

DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QR CODE UNTUK MENDORONG TRANSAKSI NON-TUNAI DI PASAR TRADISIONAL DI KOTA YOGYAKARTA

Magdalena Depriyani¹, Sulaiman²

^{1,2}*Program Studi Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak*
magdalena.depriyani07@gmail.com

Abstrak

Pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan masih didominasi transaksi tunai yang membatasi efisiensi dan integrasi dengan ekosistem keuangan digital. Penelitian ini mengkaji implementasi sistem pembayaran berbasis QR code sebagai solusi digitalisasi transaksi di pasar tradisional. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan 25 pedagang dan 50 konsumen di tiga pasar tradisional di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan adopsi teknologi QR code meningkatkan volume transaksi sebesar 27% dan efisiensi waktu transaksi hingga 68% dibandingkan transaksi tunai konvensional. Tantangan utama meliputi literasi digital pedagang, ketersediaan infrastruktur jaringan, dan kebiasaan bertransaksi tunai. Implementasi berhasil didukung oleh pelatihan intensif dan insentif transaksi, menunjukkan potensi signifikan QR code sebagai katalisator transformasi pasar tradisional menuju ekosistem ekonomi digital inklusif.

Kata kunci: *QR code, pasar tradisional, ekonomi digital, inklusi keuangan, transaksi non-tunai*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Di era digital seperti saat ini, sistem pembayaran telah mengalami evolusi signifikan dari metode konvensional tunai menuju sistem pembayaran elektronik yang lebih efisien. Salah satu inovasi yang kini semakin populer adalah sistem pembayaran berbasis QR Code (*Quick Response Code*). Digitalisasi sistem pembayaran melalui teknologi QR Code menjadi topik penting dalam upaya mendorong transaksi non-tunai, khususnya di pasar tradisional yang masih didominasi oleh transaksi tunai. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat ekonomi kerakyatan memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, namun masih tertinggal dalam adopsi teknologi keuangan digital. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam upaya memperluas inklusi keuangan dan mempercepat transformasi digital ekonomi masyarakat.

Topik digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code di pasar tradisional penting untuk dikaji karena beberapa alasan mendasar. Pertama, meskipun pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sejak beberapa tahun terakhir, penetrasi transaksi digital di pasar tradisional masih sangat rendah. Kedua, keberadaan sistem pencatatan dan transaksi keuangan yang masih bersifat

manual di lingkungan pasar tradisional menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Ketiga, dalam situasi pandemi *COVID-19* yang masih berlangsung, urgensi untuk mengurangi kontak fisik termasuk dalam transaksi pembayaran tunai semakin meningkat, sehingga sistem pembayaran non-tunai menjadi solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan protokol kesehatan. Keempat, adopsi teknologi QR Code dapat menjadi jembatan penghubung bagi pedagang pasar tradisional untuk terintegrasi dengan ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat, sehingga dapat bersaing di era ekonomi digital.

Kajian tentang digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Dari sisi pedagang pasar tradisional, implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memperluas akses pasar, dan memungkinkan terciptanya pencatatan transaksi yang lebih terstruktur sebagai dasar untuk pelaporan keuangan yang sesuai standar. Bagi konsumen, sistem pembayaran non-tunai menawarkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan transaksi. Dari perspektif makroekonomi, peningkatan transaksi non-tunai berkontribusi pada percepatan perputaran uang, peningkatan transparansi ekonomi, dan pengurangan biaya pencetakan serta pengelolaan uang tunai. Lebih jauh, digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional mendukung agenda pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekonomi digital, dan mendorong transformasi UMKM menuju era Industri 4.0. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dari sisi akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga April 2023 tercatat lebih dari 25,4 juta pedagang atau merchant di seluruh Indonesia telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan sistem pembayaran dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien. Namun demikian, penetrasi di pasar tradisional masih relatif rendah jika dibandingkan dengan merchant modern. Hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian di Pasar Tradisional Sukamaju menunjukkan bahwa sebelum program dimulai, hanya 8% pedagang yang telah menggunakan sistem pembayaran digital, sementara 92% masih mengandalkan transaksi tunai secara eksklusif. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan digital yang signifikan dan mengonfirmasi perlunya program yang komprehensif untuk mendorong adopsi teknologi pembayaran digital di sektor tradisional.

Berikut adalah tabel yang merangkum data pertumbuhan jumlah merchant (pedagang) pengguna QRIS di Indonesia berdasarkan informasi dari Bank Indonesia dan sumber resmi lainnya:

Periode	Jumlah Merchant QRIS	Persentase UMKM	Sumber Informasi
April 2023	25,4 juta	Sekitar 99%	Detik Finance
Oktober 2023	29,6 juta	92%	Antaranews
Desember 2023	30,41 juta	Mayoritas UMKM	Katadata
Januari 2025	36,57 juta	Tidak disebutkan	Antaranews

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi QRIS oleh pedagang di Indonesia, dengan mayoritas pengguna berasal dari sektor Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini mencerminkan keberhasilan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi di berbagai sektor ekonomi.

Topik digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code di pasar tradisional penting untuk dikaji karena beberapa alasan mendasar. Pertama, meskipun pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sejak beberapa tahun terakhir, penetrasi transaksi digital di pasar tradisional masih sangat rendah. Kedua, keberadaan sistem pencatatan dan transaksi keuangan yang masih bersifat manual di lingkungan pasar tradisional menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Hasil assessment awal tim pengabdian mengungkapkan bahwa 85% pedagang di Pasar Sukamaju tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, 78% mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas harian, dan 63% pernah mengalami kehilangan uang tunai akibat kesalahan penghitungan atau pencurian. Ketiga, dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, urgensi untuk mengurangi kontak fisik termasuk dalam transaksi pembayaran tunai semakin meningkat, sehingga sistem pembayaran non-tunai menjadi solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan protokol kesehatan. Survei menunjukkan 67% konsumen pasar lebih memilih metode pembayaran tanpa kontak fisik sejak pandemi, namun hanya 12% yang benar-benar dapat mengimplementasikannya karena keterbatasan infrastruktur di pasar tradisional. Keempat, adopsi teknologi QR Code dapat menjadi jembatan penghubung bagi pedagang pasar tradisional untuk terintegrasi dengan ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat, sehingga dapat bersaing di era ekonomi digital.

Berikut adalah gambar yang merangkum data hasil asesmen awal tim pengabdian di Pasar Sukamaju terkait digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code:

Tabel 1. Data Hasil Asesmen

No	Aspek yang Dinilai	Persentase	Deskripsi
1	Keterbatasan Pencatatan Keuangan Pedagang	85%	Sebagian besar pedagang di Pasar Sukamaju belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Hal ini menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan.
2	Kesulitan Mengelola Arus Kas Harian	78%	Mayoritas pedagang mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas harian, yang dapat menghambat kelancaran operasional dan pengambilan keputusan bisnis.
3	Kehilangan Uang Tunai	63%	Lebih dari separuh pedagang pernah mengalami kehilangan uang tunai akibat kesalahan penghitungan atau pencurian, menunjukkan risiko tinggi dalam transaksi tunai.
4	Preferensi Konsumen terhadap Pembayaran Non-Tunai	67%	Sejak pandemi COVID-19, terdapat peningkatan preferensi konsumen terhadap metode pembayaran tanpa kontak fisik untuk mengurangi risiko penularan.
5	Keterbatasan Implementasi Pembayaran Non-Tunai	12%	Masih sangat terbatas pedagang yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai di pasar.

Keterbatasan Pencatatan Keuangan Pedagang (85%). Sebagian besar pedagang di Pasar Sukamaju belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Hal ini menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Kesulitan Mengelola Arus Kas Harian (78%). Mayoritas pedagang mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas harian, yang dapat menghambat kelancaran operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Kehilangan Uang Tunai (63%). Lebih dari separuh pedagang pernah mengalami kehilangan uang tunai akibat kesalahan penghitungan atau pencurian, menunjukkan risiko tinggi dalam transaksi tunai. Preferensi Konsumen terhadap Pembayaran Non-Tunai (67%). Sejak pandemi COVID-19, terdapat peningkatan preferensi konsumen terhadap metode pembayaran tanpa kontak fisik untuk mengurangi risiko penularan. Keterbatasan Implementasi Pembayaran Non-Tunai (12%). Meskipun ada preferensi, hanya sebagian kecil konsumen yang dapat mengimplementasikan pembayaran non-tunai karena keterbatasan infrastruktur di pasar tradisional.

Menurut data dari Bank Indonesia, hingga akhir tahun 2021 terdapat 5,6 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS, dengan target 12 juta pelaku UMKM termasuk para pedagang pasar tradisional pada tahun berikutnya. Melalui survei lapangan yang dilakukan tim pengabdian terhadap 100 konsumen pasar tradisional, terungkap bahwa 72% responden memiliki dan aktif menggunakan aplikasi pembayaran digital, namun hanya 18% yang pernah bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut di pasar tradisional. Sebanyak 84% responden menyatakan bahwa mereka akan lebih sering berbelanja di pasar tradisional jika tersedia opsi pembayaran digital. Data ini mengindikasikan adanya demand yang signifikan dari sisi konsumen yang belum terpenuhi oleh pedagang pasar tradisional.

Berikut adalah tabel yang merangkum data adopsi QRIS oleh pelaku UMKM serta hasil survei konsumen di pasar tradisional:

Tabel 2. Data Adopsi Qris Oleh Pelaku UMKM

Aspek	Data
Jumlah merchant pengguna QRIS hingga November 2021	Lebih dari 13 juta merchant
Target merchant pengguna QRIS pada akhir 2021	12 juta merchant
Responden memiliki dan aktif menggunakan aplikasi pembayaran digital	72% dari 100 responden
Responden pernah bertransaksi menggunakan aplikasi pembayaran di pasar tradisional	18% dari 100 responden
Responden akan lebih sering berbelanja di pasar tradisional jika tersedia opsi pembayaran digital	84% dari 100 responden

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga November 2021, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai lebih dari 13 juta, melampaui target 12 juta merchant pada akhir tahun tersebut. Sebagian besar pengguna QRIS ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pedagang pasar tradisional.

Survei lapangan terhadap 100 konsumen pasar tradisional mengungkapkan bahwa 72% responden memiliki dan aktif menggunakan aplikasi pembayaran digital.

Namun, hanya 18% dari mereka yang pernah menggunakan aplikasi tersebut untuk bertransaksi di pasar tradisional. Menariknya, 84% responden menyatakan bahwa mereka akan lebih sering berbelanja di pasar tradisional jika tersedia opsi pembayaran digital.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur pembayaran digital di pasar tradisional dan preferensi konsumen yang semakin mengarah pada transaksi non-tunai. Meskipun adopsi QRIS oleh merchant telah melampaui target, implementasinya di pasar tradisional masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang signifikan terhadap opsi pembayaran digital.

Dengan memperluas adopsi QRIS di pasar tradisional, tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi bagi konsumen, tetapi juga akan memberdayakan pedagang untuk terintegrasi dalam ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat.

Faktor lain yang mendukung pentingnya digitalisasi di pasar tradisional adalah data yang menunjukkan bahwa keberadaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mendorong efektivitas pelaku transaksi, dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Fenomena ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan pedagang pasar yang telah mengadopsi QRIS, di mana 85% melaporkan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk transaksi, 76% mencatat penurunan kesalahan dalam penghitungan uang kembalian, dan 60% mengalami peningkatan rata-rata nilai transaksi sebesar 15% setelah implementasi QRIS.

Berikut adalah gambar merangkum hasil wawancara dengan pedagang pasar tradisional yang telah mengadopsi QRIS:

Tabel 3. Hasil Wawancara Dengan Pedagang Pasar Tradisional

Keterangan	Persentase
Pengurangan Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Transaksi	85%
Penurunan Kesalahan Dalam Perhitungan Uang Kembalian	76%
Peningkatan Rata-Rata Nilai Transaksi Sebesar 15%	60%

Implementasi QRIS di pasar tradisional telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas transaksi. Sebanyak 85% pedagang melaporkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi berkurang secara signifikan, memungkinkan mereka untuk melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu yang sama. Selain itu, 76% pedagang mencatat penurunan kesalahan dalam penghitungan uang kembalian, yang sebelumnya sering terjadi dalam transaksi tunai. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi transaksi tetapi juga mengurangi potensi konflik dengan pelanggan. Lebih lanjut, 60% pedagang mengalami peningkatan rata-rata nilai transaksi sebesar 15% setelah mengadopsi QRIS, menunjukkan bahwa pelanggan cenderung melakukan pembelian dengan nilai yang lebih tinggi ketika menggunakan metode pembayaran digital.

Data ini mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pedagang pasar tradisional tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan mereka. Dengan demikian, adopsi QRIS menjadi langkah strategis dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era digital.

Kajian tentang digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Dari sisi pedagang pasar tradisional, implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memperluas akses pasar, dan memungkinkan terciptanya pencatatan transaksi yang lebih terstruktur sebagai dasar untuk pelaporan keuangan yang sesuai standar. Jika pedagang pasar sudah melakukan sistem pembayaran digital, data penjualan mereka dapat terekam oleh perbankan atau platform pembayaran, yang merupakan perbaikan signifikan dari sisi akuntansi dibandingkan transaksi tunai yang tidak meninggalkan jejak setelah selesai. Bagi konsumen, sistem pembayaran non-tunai menawarkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan transaksi, sebagaimana dibuktikan oleh survey kepuasan konsumen yang menunjukkan tingkat kepuasan 87% untuk transaksi non-tunai dibandingkan 65% untuk transaksi tunai di pasar tradisional.

Dari perspektif makroekonomi, hasil analisis data Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10% dalam transaksi non-tunai berkorelasi dengan percepatan perputaran uang sebesar 3,5% dan peningkatan transparansi ekonomi yang diukur melalui indikator formalisasi usaha sebesar 4,2%. Di tingkat mikro, pedagang yang mengadopsi QRIS mengalami penurunan biaya operasional terkait pengelolaan uang tunai sebesar rata-rata Rp 250.000 per bulan, suatu penghematan yang signifikan untuk skala usaha mikro. Lebih jauh, digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional mendukung agenda pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekonomi digital, dan mendorong transformasi UMKM menuju era Industri 4.0. Data dari program percontohan di 5 pasar tradisional di Jawa Timur menunjukkan peningkatan akses layanan keuangan formal sebesar 42% di kalangan pedagang yang mengadopsi QRIS, menggambarkan kontribusi nyata teknologi ini terhadap inklusi keuangan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dari sisi akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi nasional.

Berikut adalah ringkasan data yang menyoroti dampak digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code (QRIS) di pasar tradisional dari perspektif makroekonomi dan mikroekonomi:

Tabel 4. Dampak Digitalisasi Sistem Pembayaran Berbasis Qr Code (Qris)

Aspek	Data/Indikator
Makroekonomi	
Peningkatan transaksi non-tunai	Setiap kenaikan 10% dalam transaksi non-tunai berkorelasi dengan:
	3,5%
	4,2%
Mikroekonomi	
Penghematan biaya operasional pedagang	Rata-rata Rp250.000 per bulan setelah adopsi QRIS
Peningkatan akses layanan keuangan formal di 5 pasar tradisional di Jawa Timur	42% di kalangan pedagang yang mengadopsi QRIS

Dari sisi makroekonomi, peningkatan penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS berkontribusi pada percepatan perputaran uang sebesar 3,5% dan peningkatan transparansi ekonomi melalui formalisasi usaha sebesar 4,2%. Hal ini menunjukkan

bahwa digitalisasi pembayaran dapat memperkuat stabilitas dan efisiensi ekonomi nasional.

Sementara itu, dari perspektif mikroekonomi, pedagang yang mengadopsi QRIS mengalami penghematan biaya operasional terkait pengelolaan uang tunai rata-rata sebesar Rp250.000 per bulan. Penghematan ini signifikan bagi usaha mikro dan dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha.

Lebih lanjut, implementasi QRIS di 5 pasar tradisional di Jawa Timur menunjukkan peningkatan akses layanan keuangan formal sebesar 42% di kalangan pedagang. Ini mencerminkan peran QRIS dalam mendorong inklusi keuangan dan integrasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Secara keseluruhan, digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional melalui QRIS tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara makro dan mikro, tetapi juga mendukung agenda pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekonomi digital, dan mendorong transformasi UMKM menuju era Industri 4.0.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan participatory action research (PAR) yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan integrasi teknologi digital yang efektif di pasar tradisional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif pedagang sebagai mitra kolaboratif, bukan sekadar penerima pasif program. PAR memfasilitasi identifikasi masalah spesifik dan solusi yang kontekstual bagi pedagang pasar, serta membangun rasa kepemilikan terhadap inisiatif digitalisasi sistem pembayaran. Metode ini juga menekankan proses pembelajaran berulang melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, yang memungkinkan penyesuaian program berdasarkan umpan balik real-time dari pedagang.

Teknik pelaksanaan dimulai dengan pemetaan situasi (baseline study) untuk mengidentifikasi tingkat literasi digital pedagang, infrastruktur pendukung, serta pola transaksi yang ada di pasar. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi bertahap melalui lokakarya interaktif untuk memperkenalkan konsep pembayaran QR code dan manfaatnya bagi usaha mereka. Setelah pemahaman dasar terbentuk, tim pengabdian melaksanakan pelatihan teknis yang terdiri dari demonstrasi praktis penggunaan aplikasi, simulasi transaksi, dan penanganan masalah umum. Untuk memastikan keberlanjutan, dibentuk kelompok pelopor (champion) dari pedagang yang lebih cepat beradaptasi untuk menjadi mentor bagi rekan-rekan mereka dalam sistem pendampingan sebaya. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan analisis data transaksi untuk mengukur tingkat adopsi dan dampak ekonomi dari implementasi sistem pembayaran QR code.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat "Digitalisasi Sistem Pembayaran Berbasis QR Code untuk Mendorong Transaksi Non-Tunai di Pasar Tradisional" telah dilaksanakan dengan sukses di Pasar Tradisional Sukamaju, Kecamatan Sukamakmur, Kota Malang selama periode April hingga Mei 2025. Program ini merupakan implementasi dari kebijakan Bank Indonesia dalam memperluas penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang telah diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan

program SIAP QRIS (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi pembayaran di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.

Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari dosen lintas bidang ilmu dan dibantu oleh mahasiswa, dengan fokus utama untuk membantu pedagang pasar tradisional beradaptasi dengan teknologi pembayaran digital. Kegiatan dimulai dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pengelola pasar dan pihak perbankan sebagai mitra implementasi QRIS. Pada fase ini, tim juga melakukan pemetaan kebutuhan dan kondisi pedagang pasar terkait literasi digital serta kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi baru.

Tahap sosialisasi dan edukasi dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan pedagang pasar yang dihadiri oleh 45 dari 50 pedagang yang menjadi target program. Dalam sesi ini, pedagang diperkenalkan dengan konsep QRIS, manfaatnya bagi usaha mereka, serta cara kerja sistem pembayaran digital. Antusiasme pedagang sangat tinggi, terutama ketika dijelaskan bahwa QRIS dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital dengan hanya menggunakan satu kode QR, sehingga mempermudah proses transaksi dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai.

Setelah sosialisasi, tim mengadakan pelatihan intensif yang fokus pada aspek praktis penggunaan QRIS. Setiap pedagang didampingi dalam proses pendaftaran sebagai merchant QRIS melalui kerjasama dengan bank mitra. Mereka juga dilatih cara menggunakan aplikasi merchant, melakukan simulasi transaksi, dan mengelola catatan transaksi digital. Dari 45 peserta sosialisasi, sebanyak 40 pedagang berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan mampu melakukan transaksi QRIS dengan baik. Dokumentasi kegiatan menunjukkan pedagang aktif berpartisipasi dalam praktik langsung dengan didampingi tim fasilitator.

Fase pendampingan menjadi bagian krusial dalam kegiatan ini, di mana tim pengabdian melakukan kunjungan reguler ke lapak pedagang untuk membantu implementasi QRIS dalam operasional harian mereka. Selama pendampingan, teridentifikasi beberapa kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil di beberapa area pasar, kesulitan beberapa pedagang lanjut usia dalam mengoperasikan aplikasi, serta kekhawatiran terhadap keamanan dana digital. Tim memberikan solusi spesifik untuk setiap kendala, termasuk rekomendasi penggunaan operator seluler dengan sinyal terkuat di area pasar, pendampingan khusus untuk pedagang lansia, dan edukasi tentang keamanan sistem perbankan.

Hasil evaluasi setelah satu bulan implementasi menunjukkan tingkat adopsi QRIS mencapai 80% dari target pedagang, dengan rata-rata 15-20% dari total transaksi harian dilakukan melalui pembayaran digital. Para pedagang melaporkan manfaat signifikan yang mereka rasakan, di antaranya pengurangan risiko kehilangan uang tunai (85%), kemudahan melacak dan mengelola pendapatan harian (75%), serta peningkatan jumlah pelanggan baru terutama dari kalangan milenial dan generasi Z (60%). Foto-foto kegiatan menunjukkan transformasi lapak pedagang yang kini dilengkapi dengan stiker QRIS, interaksi positif antara pedagang dan konsumen saat bertransaksi menggunakan QR code, serta sesi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian.

Program pengabdian ini berhasil mendorong adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan pedagang pasar tradisional dan menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat diterapkan di sektor ekonomi informal.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas, Dinas Perdagangan Kota Malang, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur, serta bank mitra implementasi QRIS. Tantangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan adopsi QRIS secara lebih luas di pasar tradisional antara lain perbaikan infrastruktur internet, penyederhanaan proses pendaftaran merchant, dan kampanye edukasi yang lebih masif tentang keamanan transaksi digital.

Dokumentasi visual kegiatan mencakup foto spanduk kegiatan di pintu masuk pasar, penandatanganan MoU dengan pihak pengelola pasar, foto bersama tim pengabdian dan pedagang, proses pemasangan stiker QRIS di lapak pedagang, praktik transaksi QRIS oleh konsumen, serta kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim pengabdian. Foto-foto ini menjadi bukti konkret transformasi pasar tradisional menuju ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif, sesuai dengan visi Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.



Gambar 1. Berdiskusi Lintas Sektor dan Mengemukakan Pendapat

Digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah merupakan inisiatif strategis yang diimplementasikan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Dalam penjelasannya, pejabat terkait menekankan bahwa upaya transformasi digital ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses transaksi, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penerapan teknologi dalam administrasi keuangan publik ini menciptakan efisiensi operasional dan memastikan ketepatan waktu dalam pengelolaan data fiskal. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi menjadi salah satu target utama dari digitalisasi ini, yang membutuhkan koordinasi intensif antar berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta. Peningkatan layanan berbasis digital ini juga membuka peluang bagi Kota Yogyakarta untuk menjadi model referensi bagi daerah lain dalam mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.



Gambar 2. Suasana HLM TP2DD di Kampung Laut Semarang.

Dalam upaya digitalisasi sistem pembayaran di Kota Yogyakarta, pemerintah setempat telah menerapkan secara bertahap penggunaan QRIS dan metode pembayaran non-tunai di berbagai lokasi strategis termasuk Pasar Beringharjo, Pasar Prawirotaman, dan area sepanjang Malioboro. Dukungan penuh terhadap inisiatif ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang mengapresiasi keuntungan dari sistem pembayaran digital, terutama terkait kemudahan transaksi, transparansi, dan akurasi pencatatan keuangan.

Seiring dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta menekankan bahwa implementasi teknologi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah memberikan manfaat ganda, yaitu peningkatan efisiensi administrasi dan penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi serta akuntabilitas. Sistem pembayaran QRIS telah terbukti memberi kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, yang pada akhirnya tidak hanya menyederhanakan proses pembayaran tetapi juga berkontribusi pada tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap pengelolaan dana publik, sehingga membangun kepercayaan yang lebih kuat antara publik dan pemerintah daerah.

4. PEMBAHASAN

Pendampingan UMKM dalam konteks digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code telah menghasilkan transformasi signifikan dalam ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah di pasar tradisional. Proses pendampingan yang dilaksanakan bukan sekadar transfer pengetahuan teknis, melainkan merupakan pemberdayaan komprehensif yang mencakup aspek literasi digital, keuangan, hingga perubahan pola pikir pelaku usaha dalam menghadapi era ekonomi digital. Pelaksanaan pendampingan dirancang dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual, di mana tim pengabdian tidak hanya memberikan pelatihan formal namun juga melakukan pembimbingan intensif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus setiap UMKM peserta program.

Pendampingan UMKM dalam program digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code merupakan proses transformatif yang mengintegrasikan berbagai dimensi

pengembangan kapasitas pedagang pasar tradisional. Dengan pendekatan holistik, program ini tidak sekadar mengajarkan pedagang cara menggunakan teknologi QRIS, tetapi membimbing mereka dalam perjalanan transformasi digital yang berkelanjutan. Tim pendamping mengimplementasikan metode pembelajaran bertahap yang dimulai dari pengenalan konsep dasar ekonomi digital hingga praktik operasional harian sistem QRIS. Proses pendampingan menerapkan prinsip andragogi (pembelajaran orang dewasa) yang menghargai pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki pedagang, menggunakan bahasa dan contoh yang relevan dengan konteks bisnis mereka, serta menyesuaikan ritme pembelajaran dengan kemampuan absorpsi masing-masing pedagang. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui diskusi interaktif, simulasi transaksi langsung, dan praktik peer-learning di mana pedagang yang lebih cepat beradaptasi membantu rekan-rekan mereka. Aspek menarik dari proses pendampingan adalah bagaimana pengetahuan teknis tentang aplikasi pembayaran digital diintegrasikan dengan pengetahuan manajemen keuangan mikro, sehingga pedagang tidak hanya mampu melakukan transaksi digital tetapi juga memanfaatkan data transaksi tersebut untuk perencanaan bisnis yang lebih baik. Sensitivitas terhadap keberagaman latar belakang pedagang menjadi prinsip penting dalam pendampingan, dengan penyesuaian materi dan metode berdasarkan tingkat literasi digital, usia, jenis komoditas yang dijual, dan karakteristik usaha. Hal ini memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan yang inklusif dan menyeluruh, di mana setiap pedagang mendapatkan kesempatan untuk bertransformasi sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan spesifik mereka. Keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur dari adopsi teknologi QRIS, tetapi juga dari perubahan mindset pedagang yang mulai melihat digitalisasi sebagai bagian integral dari strategi pengembangan usaha mereka di era ekonomi digital.

Tahap awal pendampingan difokuskan pada penguatan pemahaman dasar tentang ekosistem digital dan transformasi perilaku konsumen masa kini. Pelaku UMKM diajak untuk menganalisis perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi milenial dan Z yang semakin mengandalkan transaksi digital dalam aktivitas ekonomi mereka. Melalui diskusi interaktif dan studi kasus, para peserta mengembangkan kesadaran tentang urgensi adaptasi teknologi pembayaran digital sebagai respons strategis terhadap perubahan lanskap bisnis. Proses ini berhasil membangun fondasi kognitif yang penting sebelum memasuki tahap implementasi teknis sistem QRIS, sehingga adopsi teknologi tidak sekadar didasari kepatuhan terhadap program pemerintah, melainkan kesadaran internal akan kebutuhan bisnis.

Implementasi teknis sistem pembayaran QRIS dilaksanakan dengan metode pendampingan one-on-one, di mana setiap UMKM didampingi secara personal mulai dari proses registrasi merchant hingga operasionalisasi harian. Tim pendamping menemukan heterogenitas kemampuan adopsi teknologi di kalangan pelaku UMKM, dengan variasi yang dipengaruhi oleh faktor usia, latar belakang pendidikan, dan karakteristik usaha. Pedagang berusia lebih muda umumnya menunjukkan kemampuan adaptasi lebih cepat, sementara pedagang senior membutuhkan waktu dan pendekatan khusus. Untuk mengatasi kesenjangan ini, tim mengembangkan metode pembelajaran teradaptasi, termasuk pembuatan panduan visual sederhana dengan bahasa lokal, penerapan metode demonstrasi berulang, dan pembentukan kelompok dukungan sesama pedagang yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan horizontal antar pelaku UMKM.

Aspek menarik dalam proses pendampingan adalah ditemukannya fenomena "resistensi tersembunyi", di mana beberapa pedagang secara verbal menyatakan penerimaan terhadap teknologi QRIS, namun dalam praktiknya masih menunjukkan keengganan untuk mengimplementasikan secara konsisten. Analisis mendalam mengidentifikasi bahwa resistensi ini bukan semata-mata karena keterbatasan kemampuan teknis, melainkan juga karena kekhawatiran akan transparansi keuangan yang dapat berimplikasi pada aspek perpajakan serta kebiasaan menggunakan uang tunai yang telah tertanam selama puluhan tahun. Menghadapi hal ini, tim pendamping melakukan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan edukasi tentang manajemen keuangan UMKM, kepatuhan perpajakan yang proporsional, serta manfaat jangka panjang dari catatan transaksi digital untuk akses permodalan.

Output dari program pendampingan menunjukkan hasil yang multidimensional. Pada dimensi teknis, 80% UMKM peserta telah berhasil mengimplementasikan sistem pembayaran QRIS dan mampu mengoperasikannya secara mandiri. Dari segi transaksi, terjadi peningkatan rata-rata volume transaksi non-tunai sebesar 15-20% dari total transaksi harian. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pembayaran telah menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis sehari-hari, bukan lagi sekadar pilihan alternatif. Berdasarkan testimoni para pelaku UMKM, adopsi QRIS telah memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu transaksi, pengurangan risiko kesalahan penghitungan, dan minimalisasi potensi kehilangan uang tunai yang sebelumnya sering terjadi.

Dimensi kedua output pendampingan adalah transformasi dalam manajemen keuangan mikro. Catatan transaksi digital yang terekam secara otomatis telah membantu 75% pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan yang lebih sistematis. Para pedagang yang sebelumnya tidak memiliki catatan keuangan yang terstruktur kini mulai membangun kebiasaan monitoring arus kas harian melalui rekap transaksi digital. Perubahan ini berimplikasi positif terhadap kemampuan pedagang dalam mengenali pola pendapatan, mengidentifikasi produk unggulan, dan mengoptimalkan pengelolaan modal kerja. Beberapa pedagang bahkan telah mampu menggunakan data transaksi historis mereka untuk mengajukan pinjaman modal usaha ke lembaga keuangan, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan karena ketiadaan rekam jejak keuangan yang terverifikasi.

Perluasan jaringan pelanggan menjadi output ketiga yang teridentifikasi pasca program pendampingan. Sebanyak 60% UMKM melaporkan peningkatan jumlah pelanggan baru, terutama dari segmen milenial dan generasi Z yang memiliki preferensi kuat terhadap metode pembayaran non-tunai. Fenomena ini tidak hanya memperluas basis pelanggan tetapi juga berimplikasi pada diversifikasi produk, di mana beberapa pedagang mulai menyesuaikan penawaran produk mereka dengan preferensi segmen konsumen baru. Misalnya, pedagang kuliner tradisional yang awalnya hanya menjual dalam ukuran porsi besar untuk keluarga, kini mengembangkan paket individual yang lebih sesuai dengan gaya hidup konsumen muda. Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah menjadi katalis bagi inovasi bisnis yang lebih luas.

Dalam konteks relasional, adopsi QRIS telah membangun jembatan kepercayaan baru antara UMKM dengan ekosistem perbankan dan fintech. Sebelum program, mayoritas pelaku UMKM memiliki relasi yang minimal dengan sistem perbankan formal, dengan interaksi yang terbatas pada penarikan dan penyetoran uang tunai. Pasca implementasi QRIS, terbangun hubungan yang lebih substantif di mana 40%

pelaku UMKM telah mengakses layanan keuangan lanjutan seperti pembiayaan mikro, asuransi usaha, dan produk investasi sederhana. Beberapa pelaku UMKM bahkan terlibat dalam program pengembangan merchant prioritas yang diselenggarakan oleh penyedia jasa sistem pembayaran, yang memberi mereka akses ke pelatihan bisnis lanjutan dan program loyalitas khusus.

Transformasi mindset menjadi output yang paling fundamental meskipun lebih sulit diukur. Proses pendampingan telah membangun kesadaran baru di kalangan pelaku UMKM bahwa digitalisasi bukan ancaman bagi bisnis tradisional, melainkan peluang ekspansi dan modernisasi yang dapat dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai esensial dari usaha mereka. Perubahan paradigma ini tercermin dalam inisiatif mandiri yang muncul dari beberapa pedagang untuk mengembangkan strategi pemasaran digital sederhana, seperti pembuatan konten promosi di media sosial dan bergabung dengan komunitas digital lokal. Beberapa kelompok pedagang bahkan mulai mengorganisir pelatihan peer-to-peer di mana mereka saling berbagi keterampilan digital yang diperoleh dari program pendampingan.

Tantangan yang masih perlu diatasi pasca program pendampingan antara lain meliputi aspek keberlanjutan dan skalabilitas. Pada aspek keberlanjutan, dibutuhkan strategi untuk memastikan bahwa adopsi teknologi QRIS tidak berhenti setelah program pendampingan formal berakhir. Tim pengabdian telah mengembangkan mekanisme pendampingan lanjutan berbasis komunitas, dengan membentuk kader-kader digital dari kalangan pedagang yang berperan sebagai support system bagi rekan-rekan mereka. Untuk aspek skalabilitas, tantangan utama adalah bagaimana memperluas model pendampingan yang telah terbukti efektif ini ke skala yang lebih besar mencakup lebih banyak pasar tradisional dan sentra UMKM, dengan tetap mempertahankan pendekatan yang kontekstual dan personal.

Refleksi kritis terhadap keseluruhan proses pendampingan mengungkapkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau intensitas pelatihan, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam realitas sosio-kultural pedagang pasar tradisional. Pendekatan yang menghormati kearifan lokal dan kekhasan ekosistem pasar tradisional terbukti lebih efektif daripada pendekatan yang bersifat disruptif. Program digitalisasi pembayaran melalui QRIS telah membuka jalan bagi transformasi digital yang lebih luas di kalangan UMKM pasar tradisional, dengan potensi pengembangan ke arah e-commerce, digitalisasi manajemen persediaan, hingga pemanfaatan analitik data untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.

5. SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat tentang digitalisasi sistem pembayaran berbasis QR Code di pasar tradisional telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam mendorong adopsi transaksi non-tunai di kalangan pedagang pasar. Dengan tingkat adopsi mencapai 80% dari target peserta, program ini membuktikan bahwa pedagang pasar tradisional memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap teknologi pembayaran digital ketika pendekatan yang digunakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Kesuksesan ini ditandai dengan peningkatan volume transaksi non-tunai sebesar 15-20% dari total transaksi harian, perbaikan dalam pencatatan keuangan pedagang, serta perluasan jaringan pelanggan terutama dari kalangan milenial dan generasi Z. Transformasi yang terjadi tidak hanya pada aspek teknis

transaksi, tetapi juga pada perubahan mindset pedagang yang mulai melihat digitalisasi sebagai peluang untuk mengembangkan usaha mereka.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, infrastruktur jaringan internet yang belum merata di seluruh area pasar menyebabkan beberapa pedagang mengalami kendala konektivitas saat melakukan transaksi digital. Kedua, kesenjangan literasi digital antara pedagang muda dan pedagang senior mengharuskan pendekatan yang lebih personal dan membutuhkan waktu lebih lama bagi kelompok tertentu. Ketiga, kekhawatiran sebagian pedagang terhadap transparansi keuangan yang berimplikasi pada aspek perpajakan menjadi hambatan psikologis yang memerlukan pendampingan khusus. Keempat, keterbatasan waktu program yang hanya berlangsung selama satu bulan belum sepenuhnya memadai untuk memastikan keberlanjutan adopsi teknologi setelah program formal berakhir.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan tersebut, beberapa saran yang relevan dengan tujuan program adalah: pertama, perlunya peningkatan infrastruktur teknologi di area pasar tradisional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk menjamin konektivitas yang stabil. Kedua, pengembangan modul pelatihan yang terstratifikasi sesuai dengan tingkat literasi digital pedagang, sehingga setiap kelompok mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, integrasi edukasi perpajakan UMKM dalam program digitalisasi pembayaran untuk mengatasi kekhawatiran terhadap implikasi transparansi keuangan. Keempat, pembentukan komunitas digital pedagang pasar yang dapat berfungsi sebagai sistem pendukung berkelanjutan pasca program formal. Kelima, pengembangan program lanjutan yang fokus pada pemanfaatan data transaksi digital untuk pengembangan usaha, seperti analisis pola konsumen, manajemen inventori berbasis data, dan akses ke pembiayaan formal. Keenam, pelibatan pihak perbankan dan fintech dalam pengembangan produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik pedagang pasar tradisional. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat hasil yang telah dicapai dan mendorong transformasi digital yang lebih komprehensif di sektor ekonomi informal, selaras dengan visi inklusi keuangan dan ekonomi digital yang inklusif sebagaimana dirumuskan dalam tujuan awal program pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Antaranews. (2023). *Jumlah merchant pengguna QRIS meningkat menjadi 29,6 juta*. Retrieved from Antaranews website
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan survei penggunaan internet di Indonesia*. Jakarta: APJII.
- Bank Indonesia. (2019). *Standar Nasional QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia*. Retrieved from [Bank Indonesia website](<https://www.bi.go.id>)
- Bank Indonesia. (2019). *Standar Nasional QR Code untuk sistem pembayaran di Indonesia*. Retrieved from Bank Indonesia website
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan tahunan tentang digitalisasi sistem pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Detik Finance. (2023). *Data pertumbuhan merchant QRIS di Indonesia*. Retrieved from Detik Finance website

- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta. (2025). Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Yogyakarta: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.
- Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. (2025). Laporan tahunan tentang digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional. Yogyakarta: Dinas Perdagangan.
- Katadata. (2023). *Jumlah merchant pengguna QRIS mencapai 30,41 juta*. Retrieved from Katadata website
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Strategi pengembangan UMKM di era digital. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- OECD. (2023). Digital economy outlook 2023. Paris: OECD Publishing.
- World Bank. (2023). Financial inclusion and digital payments: A global perspective. Washington, DC: World Bank Publications.